

# PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DAN RELEVANSINYA BAGI PENGUATAN NASIONALISME BANGSA INDONESIA

**Marianus Mantovanny Tapung**

Prodi S-1 Keperawatan STIKes St. Paulus Ruteng, Jl.Jend. Ahmad Yani, No.10, Ruteng-Flores 86508  
Email: mtmantovanny26@gmail.com

---

**Abstract: Multicultural Education And Its Relevance For Strengthening the Nation Nationalism Indonesia.** Change and development is a necessity for all the people of the nation, including multicultural character of Indonesian society. Changes and developments can improve and develop life, but on the other hand has the potential waning of passion and sense of nationalism (nationalism), the emergence of ambiguity, anomaly, conflict, disintegration, separatism and racism, which impede the construction and development of the nation. To anticipate the needs of Multicultural Education as an approach and a strategic instrument to build and reinforce the sense and spirit of nationalism, unity, unity and integrity of the nation. Multicultural education is an instrument of social engineering that is dynamic, flexible, progressive, holistic transformasif and to reassert the awareness of nationalism, solidarity, tolerance and tolerance and can cooperate in diversity. Multicultural education becomes particularly relevant in the context of Indonesia as a manifestation of awareness about cultural diversity, democracy, human rights and reduce the tendency to think, behave and act discrimination, prejudices and stereotypes. Multicultural education community directing students to the flow velocity sensitive face of globalization, the development of democracy, and was critical of various models doctrinal monokulturalisme, radicalism and fundamentalism.

**Key Words:** Education, Multicultural, Strengthening Nationalism

**Abstrak: Pendidikan Multikultural Dan Relevansinya Bagi Penguatan Nasionalisme Bangsa Indonesia.** Perubahan dan perkembangan adalah sebuah keniscayaan untuk semua masyarakat bangsa, termasuk masyarakat Indonesia yang berkarakter multikultur. Perubahan dan perkembangan dapat meningkatkan dan mengembangkan kehidupan, tetapi pada pihak lain justru berpotensi memudarnya semangat dan rasa kebangsaan (nasionalisme), munculnya ambiguitas, anomali, konflik, desintegrasi, separatisme dan rasialisme, yang menghambat pembangunan dan pengembangan bangsa. Untuk mengantisipasi dibutuhkan Pendidikan Multikultural sebagai pendekatan dan instrumen strategis demi membangun dan menguatkan kembali rasa dan semangat kebangsaan, persatuan, kesatuan, dan keutuhan bangsa. Pendidikan multikultural merupakan instrumen rekayasa sosial yang dinamis, fleksibel, progresif, transformasif dan holistik untuk menanamkan kembali kesadaran nasionalisme, solidaritas, toleransi dan tenggang rasa serta dapat bekerjasama dalam kemajemukan. Pendidikan Multikultural menjadi sangat relevan dalam konteks Indonesia sebagai manifestasi kesadaran tentang keanekaragaman kultural, demokrasi, HAM dan mereduksi kecenderungan berpikir, bersikap dan bertindak diskriminatif, prasangka, dan stereotip. Pendidikan multikultural mengarahkan masyarakat didik untuk peka menghadapi arus perputaran globalisasi, perkembangan demokrasi, dan bersikap kritis terhadap berbagai model doktrinasi monokulturalisme, radikalisme dan fundamentalisme.

**Kata Kunci:** Pendidikan, Multikultural, Penguatan Nasionalisme

## PENDAHULUAN

Perubahan dan perkembangan yang tergabung dalam gerbong globalisasi adalah suatu keniscayaan. Masyarakat tidak mungkin lagi melepaskan diri proses globalisasi yang sarat dengan perkembangan teknologi informasi dan pengetahuan. Globalisasi yang ditandai dengan kuatnya arus, informasi, demokrasi dan penghormatan terhadap Hak-hak Asasi Manusia (HAM) dan eksistensi kelompok masyarakat, di satu pihak dapat berdampak positif, tetapi tetapi juga bisa berdampak negatif. Dampak positif akan terlihat dalam pengembangan dan pertumbuhan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, berkualitas dan berpengetahuan. Sedangkan dampak negatif dapat berupa bahaya benturan peradaban yang menyebabkan kekacauan, konflik dan perpecahan dalam suatu negara. Keadaan negatif ini digambarkan oleh Samuel P. Huntington sebagai 'benturan peradaban' (*Clash of Civilization*) dalam buku [The Future of The World Order](#) (Fukuyama & Huntington, 2003:73-83).

Apabila masyarakat tidak mampu memahami dan menghadapi fenomena ini, maka bukan tidak mungkin akan menjadi korban darinya. Masyarakat bisa berada pada posisi ambigu, kehilangan identitas dan karakter, kompetisi yang tidak sehat, dan konflik dimensional. Situasi dan kondisi ini akan berakibat pada pengerusan dan

degradasi dalam berbagai dimensi kehidupannya, yang menyebabkan melemahnya semangat kebangsaan dan keterpurukan dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, moral dan pendidikan. Ancaman pengerusan dan degradasi ini justru potensial terjadi pada keadaan bangsa Indonesia yang kental dengan suasana plural dalam bidang budaya, suku, bahasa, dan agama. Bila karakter masyarakat tidak cukup kuat menghadapi potensi pengerusan dan degradasi ini, maka berakibat pada kondisi melunturnya semangat dan rasa kebangsaan (nasionalisme), konflik, desintegrasi, separatisme dan rasialisme, yang sudah pasti berdampak pada terhambatnya pembangunan dan pengembangan bangsa.

Untuk mengantisipasi terjadinya potensi di atas, masyarakat bangsa Indonesia memerlukan pendekatan dan instrumen strategik yang dapat dijadikan sebagai sebuah gerakan nasional untuk mewujudkan membangun dan menguatkan kembali rasa kebangsaan, persatuan, kesatuan, dan keutuhan bangsa agar tetap berdaulat dan bermartabat. Menurut kami, salah satu instrumen pendekatannya yang strategis dan potensial adalah melalui penancangan dan penerapan konsep berikut praksis Pendidikan Multikultural.

Sebagai salah satu instrumen yang strategis dan potensial, Pendidikan Multikultural merupakan suatu pendekatan dinamis, fleksibel dan

progresif untuk melakukan transformasi pendidikan yang secara holistik mengkonstruksi pendidikan yang bebas monokulturisme dan diskriminasi, dan anti dengan kemajemukan. Pendidikan multikultural sebagai instrumen rekayasa sosial dapat berperan dalam menanamkan kesadaran dalam masyarakat multikultur untuk mengembangkan sikap nasionalisme, solidaritas, toleransi dan tenggang rasa serta dapat bekerjasama dalam kemajemukan.

Dalam konteks keindonesian, pendidikan berbasis multikultural diarahkan agar masyarakat didik semakin memiliki rasa kebangsaan, persatuan, kesatuan, dan keutuhan bangsa yang kuat, memiliki kepekaan menghadapi arus perputaran globalisasi, perkembangan demokrasi, dan bersikap kritis terhadap berbagai model doktrinasi monokulturalisme, radikalisme dan fundamentalisme. Dengan adanya Pendidikan Multikultural, masyarakat didik diharapkan memiliki kemampuan berpikir kritis (*critical thinking*) terhadap berbagai perkembangan dan perubahan yang mengarah pada kerusakan lingkungan alam, sosial dan budaya serta perpecahan baik secara vertikal maupun horisontal.

Mengingat pentingnya menjaga dan menguatkan nasionalisme, kemampuan kritis dalam menghadapi perkembangan dan menjawab beberapa problematika kemajemukan, maka dibutuhkan komitmen dan tanggung

jawab semua *stakeholder*, baik dalam tingkat local maupun nasional dalam menerapkan konsep dan praksis Pendidikan Multikultur. Sebagai sebuah gerakan nasional Pendidikan Multikultural perlu di-*endors* dan didukung, karena merupakan manifestasi kesadaran tentang adanya keanekaragaman, demokrasi, HAM. Penerapan konsep dan praksis Pendidikan Multikultural di sekolah dapat meminimalisasi dan mereduksi segala bentuk kecenderungan berpikir, bersikap dan bertindak diskriminatif, prasangka, stereotip, fanatistik dan radikalistik. Melalui Pendidikan Multikultural masyarakat didik memiliki pengertian dan pemahaman terhadap sesama tanpa membedakan status sosio ekonomi, gender, orientasi seksual, latar belakang etnis, ras atau budaya dan agamanya. Pendidikan Multikultural menjadi salah satu bentuk rekayasa sosial dan instrumen strategis untuk mengembangkan kesadaran atas kebanggaan seseorang terhadap bangsanya.

## **RASIONAL MUNCULNYA PARADIGMA PENDIDIKAN MULTIKULTURAL**

Konsep dan praksis Pendidikan Multikultural tidak muncul begitu saja, tetapi merupakan hasil dari dialektika pemikiran yang sudah pasti berbasis pada masalah krusial yang sudah, sedang dan akan melanda masyarakat

bangsa baik local, nasional maupun global. Oleh karena itu, kami membahas bagian ini mulai dari (1) Ketegangan Global yang Memicu Ketidakseimbangan dan Benturan Peradaban, selanjutnya (2) Pemahaman Multikulturalisme dan Membangun Kesadaran Multikultural; (3) Pendekatan Pendidikan Multikultural yang Dinamis, Progresif dan Fleksibel; dan (4) Pendidikan Multikultural dan Pencapaian Kompetensi Integratif

### **Ketegangan Global yang Memicu Ketidakseimbangan dan Benturan Peradaban**

Saat ini, masyarakat dunia pada umumnya dan masyarakat Indonesia khususnya sedang mengalami fenomena “sudden shift” (Kompas, 24 Agustus 2015) yang berkarakter ‘tiba-tiba’ (*sudden*), ‘cepat’ (*speed*), dan ‘mengejutkan’ (*surprise*). Namun, jauh sebelum gambaran fenomena ini, laporan Komisi Pendidikan UNESCO yang berjudul *Learning: The Treasure Within* (Delors, 1996, 17-18), telah mengangkat beberapa macam fenomena ‘ketegangan’ yang menjadi tantangan sekaligus ancaman bagi masyarakat dunia di abad 21. Fenomena ketegangan tersebut, antara lain: antara *globalisasi* dan *lokalisasi*, antara *universalitas* dan *individualitas*, antara *tradisi* dan *modernitas*, antara *kompetisi* dan *solidaritas*, antara *akselerasi ekspansi pengetahuan* dan *daya serap manusia*, dan antara yang *spiritual* dan *material*.

Alvin Toffler dalam bukunya *Future Shock* (1970) dan *The Third Wave* (1980) sudah menggambarkan tentang situasi dan kondisi tegang masyarakat pada akhir abad 20 (menuju abad 21), yang ditandai dengan berbagai gelombang perubahan. Sementara itu, John Naisbit dalam bukunya *Megatrends* (1982) dan *Reinventing The Corporation* (1985) mengulas tentang munculnya ketegangan itu ketika terjadi pergeseran pemahaman terhadap dunia yang bukan lagi sebagai perkampungan kecil (*small village*), tetapi sudah menjadi suatu kampung besar (*global village*) (Mahfud, 2008:viii).

Perubahan-perubahan yang terjadi sekarang ini sebagai dampak kemajuan informasi, ilmu dan teknologi serta masuknya arus globalisasi membawa pengaruh multidimensional. Dengan demikian, untuk mempersiapkan masyarakat yang berkarakter majemuk dalam menghadapi berbagai perubahan tersebut, sangat dibutuhkan pendidikan dan pembelajaran dengan pendekatan dan model multikultural. Dalam perspektif global, tantangan dunia pendidikan salah satunya adalah pemahaman pendidikan yang tidak rasis untuk mempersiapkan dan mendukung pembelajaran tentang proses antar budaya, pembangunan kemasyarakatan dan kalau perlu aksi kelas. Dengan demikian, dunia pendidikan dalam era global harus memahami isu-isu dan permasalahan global seperti: keanekaragaman budaya, politik, ekonomi, sosial, konflik dan perda-

maian, ketergantungan antar bangsa di dunia, masalah HAM, masalah lingkungan seperti: degradasi lingkungan, penyakit dan migrasi penduduk, dll. (Mahfud, 2008:19).

Sementara itu, fenomena kemajemukan suatu bangsa bagaikan pisau bermata dua, satu sisi memberi dampak positif, yaitu kita memiliki kekayaan khasanah budaya yang beragam, akan tetapi sisi lain juga dapat menimbulkan dampak negatif, karena terkadang justru keragaman ini dapat memicu konflik antar kelompok masyarakat yang pada gilirannya dapat menimbulkan konflik peradaban yang berakibat pada instabilitas di bidang keamanan, sosial, politik maupun ekonomi.

Sosiolog Prancis Emile Durkheim (1858-1917) menyebut kondisi perubahan (peralihan peradaban) dan pergeseran masyarakat ini berdampak pada suatu kondisi 'tanpa nilai' atau yang disebut *anomie* (Rochiati, 2015:87-88; Outhwaite, 2008:24). *Anomie* terjadi ketika terlibat dalam peralihan peradaban manusia merasakan kebingungan karena budaya dan nilai-nilai yang lama akan ditinggalkan, sedangkan budaya dan nilai-nilai baru belum berhasil dicapai. Kebingungan ini menjadi potensi terjadinya konflik dan kekacauan ketika masyarakat tidak mampu mengelolanya secara kritis dan rasional.

Menurut Huntington (Fukuyama & Huntington, 2003:77-81) ada lima kenyataan mendasar yang dapat men-

dukung terjadinya konflik peradaban, antara lain: (1) Kuatnya diferensiasi sejarah, bahasa, budaya, tradisi dan agama sehingga menyebabkan terjadinya konflik yang berkepanjangan; (2) Interaksi yang meningkat dalam dunia yang semakin sempit mempertajam perbedaan dan menguatnya etnisitas; (3) proses modernisasi ekonomi dan perubahan sosial membuat masyarakat tercerabut dari identitas local yang sudah berakar dalam dan melemahnya sumber identitas; (4) Terjadinya proses marginalisasi terhadap kaum pribumi akibat kuatnya hembusan westernisasi; (5) kompromi politik dan ekonomi lebih mudah dilakukan dibandingkan kompromi dalam bidang budaya. Budaya sering dikorbankan untuk kepentingan keberhasilan kompromi politik dan ekonomi.

Menurut Tilaar (2004:14-15), terdapat beberapa hal yang turut memicu (*casus belli*) munculnya konflik dalam masyarakat multikultur dewasa ini, antara lain: (1) adanya perebutan sumber daya, alat-alat produksi, dan kesempatan ekonomi (*access to economic resources and to means of production*); (2) perluasan batas-batas sosial budaya (*social and cultural borderline expansion*); (3) benturan kepentingan politik, ideologi, dan agama (*conflict of political, ideology, and religious interest*).

Gibson (Djohar, 2003:85) menggambarkan bahwa kebanyakan masyarakat bangsa modern dan postmodern yang ditandai oleh adanya situasi hiper kompetisi, suksesi revolusi

teknologi serta dislokasi dan konflik sosial. Situasi ini menghasilkan keadaan yang non-linier dan sangat tidak dapat diperkirakan dari keadaan masa lampau dan masa kini. Masa depan hanya dapat dihadapi dengan kreativitas, meskipun posisi keadaan sekarang memiliki peranan penting untuk memicu kreativitas. Lebih lanjut dijelaskan bahwa perubahan keadaan yang non-linier dan majemuk ini tidak akan dapat diantisipasi dengan cara berpikir, bersikap dan bertindak linier. Pemikiran, sikap dan tindakan linier dan rasional yang sekarang ini berkembang tidak lagi fungsional untuk mengakomodasi perubahan keadaan yang akan terjadi. Perang, konflik, dan maraknya kerusuhan yang berlatar belakang suku, adat, ras, dan agama yang kerap terjadi di banyak negara akhir-akhir ini, mungkin salah satunya disebabkan karena pikiran, sikap dan tindakan manusia yang linear-rasional tidak bisa lagi secara optimal mengakomodasi dan memfasilitasi perubahan yang non-linier, majemuk dan cenderung 'tiba-tiba' (*sudden*), 'cepat' (*speed*), dan 'mengejutkan' (*surprise*).

### **Pemahaman Multikulturalisme dan Membangun Kesadaran Multikultural**

Lantas bagaimana menghadapi keadaan seperti yang sudah digambarkan di atas? Samuel P. Huntington (Fukuyama & Huntington, 2003:175-176) dalam poin tentang *Mati Demi Kebudayaan*, menegaskan bahwa benturan peradaban hanya dapat dipahami jika peradaban

itu dikenal. Dalam dunia peradaban yang berbeda, harus belajar untuk hidup berdampingan dengan yang lain. Memahami dan menghayati "perbedaan" menjadi 'sesuatu yang tidak boleh tidak' (*conditio sine qua non*) ketika berpikir, bersikap dan bertindak dalam menghadapi kejadian-kejadian sebagai dampak logis dari benturan peradaban. Kejadian-kejadian destruktif sebagai dampak logis dari benturan peradaban hanya bisa direduksi dan dikelola, bila masyarakat secara individual dan komunal menciptakan dan membangun kesadaran akan pentingnya multikulturalisme. Multikulturalisme dan pengejawantahannya menjadi sangat vital dan mendesak untuk dicanangkan dan diterapkan demi mencegah dan mengatasi eksese-eksese destruktif sebagai akibat dari perubahan yang tiba-tiba, non-linear dan majemuk.

Konsep multikulturalisme menekankan pentingnya memandang dunia dari bingkai referensi budaya yang berbeda, dan mengenali serta menghargai kekayaan ragam budaya di dalam negara dan di dalam komunitas global. Multikulturalisme menegaskan perlunya menciptakan pendidikan di mana berbagai perbedaan yang berkaitan dengan ras, etnis, gender, orientasi seksual, keterbatasan, dan kelas sosial diakui dan seluruh masyarakat didik dipandang sebagai sumber yang berharga untuk memperkaya proses pembelajaran.

Menurut Parekh seperti yang dikutip Azyumardi Azra (2007) menga-

takan: *A Multicultural society, then is one that includes several cultural communities with their overlapping but none the less distinct conception of the world, system of meaning, values, forms of social organizations, histories, customs and practices*". Masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri dari beberapa macam komunitas budaya dengan segala kelebihanannya, dengan sedikit perbedaan konsepsi mengenai dunia, suatu sistem arti, nilai, bentuk organisasi sosial, sejarah, adat serta kebiasaan. Selanjutnya, Azyumardi Azra menjelaskan bahwa *multikulturalisme* merupakan salah satu bentuk cara pandangan dunia yang diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keagamaan, pluralitas, dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, *multikulturalisme* dapat juga dipahami sebagai pandangan dunia yang kemudian diwujudkan dalam kesadaran politik.

Sementara itu Akhyar Yusuf Lubis (2006:174), dalam bukunya *Deskonstruksi Epistemologi Modern* menjelaskan *multikulturalisme* sebagai paham yang mencakup suatu pemahaman, penghargaan serta penilaian atas budaya seseorang, serta suatu penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain, dan dapat juga dilihat sebagai sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *multikultural-*

*isme* mencakup gagasan, cara pandang, kebijakan, penyikapan dan tindakan, oleh masyarakat suatu negara, yang majemuk dari segi etnis, budaya, agama dan sebagainya, namun mempunyai cita-cita untuk mengembangkan semangat kebangsaan yang sama dan mempunyai kebanggaan untuk mempertahankan kemajemukan tersebut. *Multikulturalisme* adalah berbagai manifestasi pola pikir, sikap dan tindakan bagaimana masing-masing kelompok bersedia untuk menyatu (*integrate*) tanpa mempedulikan keragaman budaya yang dimiliki. Mereka semua melebur, sehingga pada akhirnya ada proses 'hidridisasi' yang meminta setiap individu untuk tidak menonjolkan perbedaan masing-masing.

Keadaan ini mendorong beberapa pemerhati dan pemikir pendidikan pada beberapa bangsa yang memiliki tingkat kemajemukan yang tinggi untuk mendesain praksis pendidikan masa depan yang dapat mengakomodasi situasi kemajemukan tersebut. Desain pendidikan yang mengakomodasi ragam kultur ini bertujuan untuk membangun resistensi yang tinggi terhadap munculnya konflik sebagai konsekuensi dinamika kohesivitas sosial pada masyarakat didiknya. Dalam menghadapi pluralisme budaya tersebut, diperlukan paradigma baru yang lebih toleran dan elegan untuk mencegah dan memecahkan masalah benturan-benturan budaya tersebut, yaitu paradigma pendidikan multikultural. Hal ini penting untuk mengarahkan

anak didik dalam mensikapi realitas masyarakat yang beragam, sehingga mereka akan memiliki sikap apresiatif terhadap keragaman perbedaan tersebut. Pendidikan Multikultural dapat membawa pendidikan yang mampu menciptakan tatanan masyarakat yang terdidik dan berpendidikan, bukan suatu masyarakat yang menjauhi realitas sosial dan budaya.

### **Pendidikan Multikultural dan Rekonstruksi Sosial yang Dinamis, Progresif dan Fleksibel**

Menurut Durkheim, salah satu cara untuk bisa mengantisipasi dan mengembalikan keadaan ini adalah dengan melakukan rekonstruksi sosial yang dapat dilakukan dengan kegiatan pendidik (Rochiati, 2015:87-88), di mana masyarakat didik diarahkan kembali untuk menjalankan interaksi sosialnya dengan mengedepankan nilai-nilai universal yang terkandung dalam nilai-nilai kultural dan agama.

Salah satu bentuk rekonstruksi sosial dalam bidang pendidikan adalah dengan mewacanakan konsep dan praksis pendidikan yang berbasis multicultural atau Pendidikan Multikultural. Sebagai sebuah bentuk rekonstruksi sosial, Pendidikan Multikultural menjadi sangat urgen dan mendesak untuk dikonsepsikan dan dipraktikkan dalam kegiatan pembelajaran di Negara-negara yang sangat bernuansa plural dan multikultural demi tegaknya keseimbangan. Hal ini ditegaskan oleh

Lebih lanjut, James A. Banks dalam bukunya *Multicultural Education* (1993:2) yang mendefinisikan Pendidikan Multikultural sebagai:

*An idea, an educational reform movement, and a process whose major goal is to change the structure of educational institutions so that male and female students, exceptional students, and students who are members of diverse racial, ethnic, and cultural groups will have an equal chance to achieve academically in school*

Pendidikan Multikultural adalah ide, gerakan pembaharuan pendidikan dan proses pendidikan yang tujuan utamanya adalah untuk mengubah struktur lembaga pendidikan supaya siswa baik pria maupun wanita, siswa berkebutuhan khusus, dan siswa yang merupakan anggota dari kelompok ras, etnis, dan kultur yang bermacam-macam itu akan memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai prestasi akademis di sekolah. Jadi Pendidikan Multikultural akan mencakup: (1) Ide dan kesadaran akan nilai penting keragaman budaya; (2) Gerakan pembaharuan pendidikan; (3) Proses pendidikan.

Selanjutnya, menurut Banks (1993:19): *Multicultural education*

*describes a system of instruction that attempts to foster cultural pluralism and acknowledges the differences between races and cultures. It addresses the educational needs of a society that contains more than*



*one set of traditions, that is a mixture of many cultures. The goal of multicultural education is to help students understand and appreciate cultural differences and similarities and to recognize the accomplishments of diverse ethnic, racial, and socioeconomic groups. It is a practice that hopes to transform the ways in which students are instructed by giving equal attention to the contributions of all the groups in a society.*

Pendidikan Multikultural menggambarkan tentang sistem instruksional yang mencoba untuk mendorong pluralisme budaya dan mengakui perbedaan antara ras dan budaya. Hal ini ditujukan untuk mengakomodasi kebutuhan pendidikan masyarakat yang berisi lebih dari satu set tradisi, yang merupakan campuran dari berbagai budaya. Tujuan pendidikan multikultural adalah untuk membantu siswa memahami dan menghargai perbedaan budaya dan persamaan dan mengenali pencapaian kelompok-kelompok etnis, ras, dan sosial ekonomi yang beragam. Pendidikan multikultural menjadi praktek pendidikan yang diharapkan dapat mengubah cara pendidikan, di mana siswa dibelajarkan dengan perhatian yang sama dengan kontribusi dari semua kelompok dalam masyarakat.

Pendidikan Multikultural merupakan suatu rangkaian kepercayaan (*set of beliefs*) dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis di dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identi-

tas pribadi, kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun negara. Di dalam pengertian ini terdapat adanya pengakuan yang menilai penting aspek keragaman budaya dalam membentuk perilaku manusia.

Selanjutnya, menurut Banks (2002:57-60) paradigma Pendidikan Multikultural sebagai salah satu instrumen strategis untuk mengakomodasi realitas majemuk masyarakat, memiliki lima dimensi yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu: (1) *Content integration; Concepts, values, and materials from a variety of cultures are included in teaching.* Integrasi konten, yaitu pemaduan konten menangani sejauh mana guru menggunakan contoh dan konten dari beragam budaya dan kelompok untuk menggambarkan konsep-konsep, nilai-nilai, prinsip, generalisasi serta teori utama dalam bidang mata pelajaran atau disiplin mereka; (2) *The Knowledge Construction Process; This belief asserts that all knowledge is created in the minds of human beings and can, therefore, be challenged. A critical part of multicultural education, the idea that knowledge is a human construct challenges teachers to alter their own perceptions of the world before they can teach multiculturally.* Proses penyusunan pengetahuan; sesuatu yang berhubungan dengan sejauh mana guru membantu pemahaman siswa, menyelidiki, dan untuk menentukan bagaimana asumsi budaya yang tersirat, kerangka acuan, perspektif dan prasangka di

dalam disiplin mempengaruhi cara pengetahuan disusun di dalamnya. (3) *An Equity Paedagogy; Teachers must modify their methods of instruction by allowing for students' cultural differences before they can encourage academic achievement.* Pedagogi kesetaraan; pedagogi kesetaraan terjalin ketika guru mengubah pengajaran mereka ke cara yang akan memfasilitasi prestasi akademis dari siswa dari berbagai kelompok ras, budaya, dan kelas sosial. Termasuk dalam pedagogi ini adalah penggunaan beragam gaya mengajar yang konsisten dengan banyaknya gaya belajar di dalam berbagai kelompok budaya dan ras. (4) *Prejudice Reduction; Teachers must work to shift students' prejudices regarding race and ethnicity. Prejudice reduction may also encompass teaching the tolerance of various religions, sexual preferences, and disabilities.* Mengurangi prasangka; dimensi ini fokus pada karakteristik dari sikap rasial siswa dan bagaimana sikap tersebut dapat diubah dengan metode dan materi pembelajaran. (5) *Empowering school culture: Schools must identify those aspects of education that hinder learning and then empower families and students from all backgrounds, so that the full development of students is achieved.* Budaya sekolah dan struktur sekolah yang memberdayakan; praktik pengelompokan dan penamaan partisipasi olah raga, prestasi yang tidak proporsional, dan interaksi staf, dan siswa antar etnis dan ras adalah beberapa dari komponen budaya sekolah yang harus diteliti untuk menciptakan budaya sekolah yang memberdayakan siswa

dari beragam kelompok, ras, etnis dan budaya.

Joseph R. Jones dalam artikelnya *Infusing Multicultural Education into The Curriculum: Preparing Pre-Service Teachers to Address Homophobia in K-12* (2005:107-118) menegaskan Pendidikan Multikultural diartikan sebagai pendidikan mengenai keragaman kebudayaan. Pendidikan Multikultural adalah perspektif yang mengakui realitas sosial, politik, dan ekonomi yang dialami oleh masing-masing individu dalam pertemuan manusia yang kompleks dan beragam secara kultur, dan merefleksikan pentingnya budaya, ras, seksualitas dan gender, etnisitas, agama, status sosial, ekonomi, dan pengecualian-pengecualian dalam proses pendidikan.

Sementara itu, Robin L. Danzak dalam artikelnya *'Sometimes the Perspective Changes': Reflections on a Photography Workshop with Multicultural Students in Italy* (2015:56-75) mengkaji Pendidikan Multikultural sebagai suatu pendekatan dinamis, fleksibel, progresif dan untuk melakukan transformasi pendidikan yang secara holistik memberikan kritik dan menunjukkan kelemahan-kelemahan, kegagalan-kegagalan dan diskriminasi yang terjadi di dunia pendidikan. Sebagai suatu gerakan pembaharuan dan proses untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang setara untuk seluruh siswa, Pendidikan Multikultural memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut

: (1) Gerakan politik yang bertujuan menjamin keadilan sosial bagi seluruh warga masyarakat tanpa memandang latar belakang yang ada; (2) Mengandung dua dimensi: pembelajaran (kelas) dan kelembagaan (sekolah) dan antara keduanya tidak bisa dipisahkan, tetapi justru harus ditangani lewat reformasi yang komprehensif; (3) Menekankan reformasi pendidikan yang komprehensif dapat dicapai hanya lewat analisis kritis atas sistem kekuasaan dan *privileges* untuk dapat dilakukan reformasi komprehensif dalam pendidikan; (4) Menyediakan bagi setiap siswa jaminan memperoleh kesempatan guna mencapai prestasi maksimal sesuai dengan kemampuan yang dimiliki; (5) Pendidikan yang baik untuk seluruh siswa, tanpa memandang latar belakangnya.

Prinsip dinamis, progresif dan fleksibel Pendidikan Multikultural juga disarankan Marianne Modica dalam artikelnya "*My Skin Color Stops Me from Leading*": *Tracking, Identity, and Student Dynamics in a Racially Mixed School* (2015:76-78). Ia menegaskan bahwa sangat keliru kalau melaksanakan pendidikan multikultural harus dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah atau monolitik. Sebaliknya, dia mengusulkan agar pendidikan multikultural diperlakukan sebagai pendekatan untuk memajukan pendidikan secara utuh, menyeluruh dan terintegratif. Pendidikan multikultural juga dapat diberlakukan sebagai alat bantu

untuk menjadikan warga masyarakat lebih memiliki dinamis, progresif, fleksibel, toleran, bersifat inklusif, dan memiliki jiwa kesetaraan dalam hidup bermasyarakat, serta senantiasa berpendirian suatu masyarakat secara keseluruhan akan lebih baik, manakala siapa saja warga masyarakat memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang dimiliki bagi masyarakat sebagai keutuhan.

### **Pendidikan Multikultural dan Pencapaian Kompetensi Integratif**

Peran Pendidikan Multikultural sangat esensial dalam membentuk kompetensi dalam diri peserta didik. Dalam aktivitas Pendidikan Multikultural selain siswa diarahkan untuk mencapai kompetensi kultural, tetapi juga kompetensi lain seperti sosial, personal dan pedagogic serta kompetensi-kompetensi lain yang dapat mendukung keterampilan dalam menjalani kehidupan sebagai anggota masyarakat. Secara intruksional, semua kompetensi itu dapat terintegrasi dalam rumusan tujuan atau dampak instruksional (*instructional effect*) maupun dalam dampak penggiringnya (*nurturant effect*).

Monica (2015:89-90) merekomendasikan agar pendidikan yang berbasis multikultural bersifat integrative, di mana selain memberi kesempatan bagi siswa untuk mempelajari bagaimana suatu kultur masyarakat bisa berperan dalam upaya peningkatan kemakmuran

dan kesejahteraan bagi warganya, tetapi juga memahami bagaimana menganalisis dan memecahkan berbagai masalah sosial yang timbul akibat perubahan dan perkembangan (bdk. Rochiati, 2015:84-85). Karenanya, Pendidikan Multikultural diusulkan untuk dapat dijadikan instrumen rekayasa sosial lewat pendidikan formal, artinya institusi sekolah harus berperan dalam menanamkan kesadaran hidup dalam masyarakat multikultural dan mengembangkan sikap tenggang rasa, bekerjasama, toleransi dan memecahkan masalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakatnya.

Secara kelembagaan, sekolah harus dipandang sebagai suatu masyarakat, masyarakat kecil; artinya, apa yang ada di masyarakat harus ada pula di sekolah. Perspektif sekolah sebagai suatu masyarakat kecil ini memiliki implikasi bahwa siswa dipandang sebagai suatu individu yang memiliki karakteristik yang terwujud dalam bakat dan minat serta aspirasi yang menjadi hak siswa.

Dalam bukunya *Making Choices for Multicultural Education: Five Approaches to Race, Class, and Gender*, Sleeter, C., & Grant, (199:31) memberi arahan tentang kebijakan sekolah dan kurikulum multicultural yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dengan tetap memperhatikan berbagai perbedaan yang dimiliki masing-masing individu. Adabeberapa hal yang perlu diperhatikan sekolah, yaitu: (1) setiap siswa memiliki kebutuhan perkembangan yang berbeda-beda, termasuk kebutuhan personal

dan sosial; (2) kebutuhan vokasi dan karier; (3) kebutuhan psikologi dan perkembangan moral spiritual. Pada level masyarakat, yang perlu dipenuhi kebutuhannya adalah mencakup : (1) kebutuhan akademik; (2) kebutuhan psikologis; (3) kebutuhan kebersamaan, dan (4) kebutuhan rasa aman. Pendidikan harus dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Sekolah harus dapat dijadikan tempat yang aman, memiliki suasana kekerabatan dan juga terdapat semangat saling dukung mendukung. Berkaitan dengan itu, maka proses pembelajaran diarahkan pada pengembangan individu secara utuh yang mencakup intelektual, sosial, dan moral spiritual.

Dari perspektif hasil pembelajaran, Pendidikan Multikultural memiliki tiga sasaran pemberdayaan kompetensi dalam diri siswa (Banks, 2007:11), yaitu: (1) Pengembangan identitas kultural (*cultural identity development*). Dalam pengembangan ini siswa diarahkan untuk mengidentifikasi dirinya dengan suatu etnis tertentu. Kompetensi ini mencakup pengetahuan, pemahaman dan kesadaran akan kelompok etnis dan menimbulkan kebanggaan serta percaya diri sebagai warga kelompok etnis tertentu. (2) Hubungan interpersonal (*Interpersonal Relationship*). Pemberdayaan kompetensi ini berkaitan dengan upaya melakukan hubungan dengan kelompok etnis lain, dengan senantiasa mendasarkan pada persamaan dan kesetaraan, serta menjauhi sifat syakwasangka dan stereotip; (3)

Memberdayakan diri sendiri (*self Empowerment*). Siswa diarahkan untuk mampu mengembangkan secara terus menerus apa yang dimiliki berkaitan dengan kehidupan multikultural.

Hal ini sejalan dengan fungsi Pendidikan Multikultural yang dikemukakan oleh *The National Council for Social Studies* sebagaimana yang dikutip Hilda Hernandez (1989:17) dalam bukunya *Multicultural Education: A Teacher Guide to Linking Context, Process, and Content*. Fungsi Pendidikan Multikultural adalah sebagai berikut: (1) Memberi konsep diri siswa yang jelas; (2) Membantu memahami pengalaman kelompok etnis dan budaya ditinjau dari sejarahnya; (3) Membantu memahami bahwa konflik antara ideal dan realitas itu memang ada pada setiap masyarakat; (4) Membantu mengembangkan pembuatan keputusan (*decision making*), partisipasi sosial dan ketrampilan kewarganegaraan (*citizenship skills*); (5) Mengenal keberagaman dalam penggunaan bahasa. Pendidikan Multikultural memberi tekanan bahwa sekolah pada dasarnya berfungsi mendasari perubahan masyarakat dan meniadakan penindasan dan ketidakadilan.

Fungsi Pendidikan Multikultural yang mendasar adalah mempengaruhi perubahan sosial (Gorski, 2001), yang menyangkut: (1) perubahan diri; (2) perubahan sekolah dan persekolahan; (3) perubahan masyarakat. Perubahan diri dimaknai sebagai perubahan dimulai dari diri siswa sendiri itu sendiri yang lebih menghargai orang

lain agar dia bisa hidup damai dengan sekelilingnya. Kemudian diwujudkan dalam tata tutur dan tata perlakunya di lingkungan sekolah dan berlanjut hingga di masyarakat. Karena sekolah merupakan agen perubahan, maka diharapkan ada perubahan yang terjadi di masyarakat seiring dengan terjadi perubahan yang terdapat dalam lingkungan persekolahan.

Selanjutnya, adapun kompetensi kultural yang hendak dicapai dalam proses berlangsungnya Pendidikan Multikultural ini (Gorski, 2001), sebagai berikut: (1) Kompetensi individu untuk menerima, menghormati dan membangun kerjasama dengan siapapun juga yang memiliki perbedaan-perbedaan dari dirinya; (2) Kompetensi kultural merupakan hasil dari kesadaran atas pengetahuan dan "bias kultural" yang dimilikinya atau sebagai faktor yang mempengaruhi perbedaan kultur; (3) Proses pengembangan kompetensi kultural memerlukan pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang memungkinkan seseorang memahami dan berinteraksi secara efisien dengan orang yang memiliki perbedaan kultur.

Wahab (2014) dalam artikelnya *Multicultural Education: Its Implication For General Education And Gifted Education In Indonesia*, memberi arahan tentang pengembangan kompetensi kultural dalam Pendidikan Multikultural. Menurutnya, kompetensi kultural dibentuk oleh berbagai factor, antara

lain: penguasaan pengetahuan, *critical thinking*, daya kritis, kemampuan mengembangkan sesuatu, dan kemampuan praktis. Keempat faktor tersebut tidak statis melainkan dinamis, terus bergerak dalam membentuk kompetensi kultural. Ia kemudian menambahkan bahwa Pendidikan Multikultural juga sangat relevan dengan pendidikan demokrasi di masyarakat plural seperti Indonesia, yang menekankan pada pemahaman akan multi etnis, multi ras, dan multikultur yang memerlukan konstruksi baru atas keadilan, kesetaraan dan masyarakat yang demokratis.

Menurut Wahab (2014) Pendidikan multikultural merupakan suatu proses transformasi yang tentunya membutuhkan waktu panjang untuk mencapai maksud dan tujuannya. Ada beberapa tujuan yang akan dikembangkan pada diri siswa dalam proses Pendidikan Multikultural, yaitu: (1) Peserta didik memiliki kemampuan berpikir kritis atas apa yang telah dipelajari; (2) Peserta didik memiliki kesadaran atas sifat sakwasangka atas pihak lain yang dimiliki, dan mengkaji mengapa dan dari mana sifat itu muncul, serta terus mengkaji bagaimana cara menghilangkannya; (3) Peserta didik memahami bahwa setiap ilmu pengetahuan bagaikan sebuah pisau bermata dua: dapat dipergunakan untuk menindas atau meningkatkan keadilan sosial; (4) Peserta didik memahami bagaimana

mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang dimiliki dalam kehidupan; (5) Peserta didik merasa terdorong untuk terus belajar guna mengembangkan ilmu pengetahuan yang dikuasainya; (6) Peserta didik memiliki cita-cita posisi apa yang akan dicapai sejalan dengan apa yang dipelajari; (7) Peserta didik dapat memahami keterkaitan apa yang dilakukan dengan berbagai permasalahan dalam kehidupan masyarakat dalam berbangsa.

Untuk itu, para guru yang memberikan pendidikan multibudaya harus memiliki keyakinan bahwa perbedaan budaya memiliki kekuatan dan nilai, sekolah harus menjadi teladan untuk ekspresi hak-hak manusia dan penghargaan untuk perbedaan budaya dan kelompok, keadilan dan kesetaraan sosial harus menjadi kepentingan utama dalam kurikulum, sekolah dapat menyediakan pengetahuan, keterampilan, dan karakter yaitu nilai, sikap, dan komitmen, untuk membantu siswa dari berbagai latar belakang, sekolah bersama keluarga dan komunitas dapat menciptakan lingkungan yang mendukung multibudaya.

Dalam konteks praksis pendidikan dan pembelajaran yang berpusat pada siswa (*student center learning*), peran guru dan lingkungan sangat vital dan menentukan dalam aktivitas pendidikan multikultural. Menurut Hernandez (1989:21) peran guru dan lingkungan sekolah, antara lain: (1) *Each student must have equal opportunities to achieve his or her*

*full potential* (Setiap siswa harus memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kepenyuaan potensinya).; (2) *Every student must be able to participate in an increasingly multicultural society* (Setiap siswa harus mampu berpartisipasi dalam masyarakat yang semakin multikultural); (3) *Teachers must be able to facilitate learning for every student, no matter how similar or different each student is from the teacher* (Guru harus mampu memfasilitasi pembelajaran bagi setiap siswa, tidak peduli seberapa sama atau berbeda setiap siswa dari guru); (4) *Schools must actively work towards ending oppression of all types, by ending it within their own walls* (Sekolah harus secara aktif bekerja untuk mengakhiri penindasan dari semua jenis, dengan mengakhiri itu dalam dinding mereka sendiri); (5) *Education must include the voices and experiences of all students*; (Pendidikan harus mengakomodasi dan memfasilitasi suara-suara (aspirasi) dan pengalaman dari semua siswa)

## **PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DAN RELEVANSINYA BAGI PENGUATAN NASIONALISME BANGSA INDONESIA**

Dalam membahas bagian 'Pendidikan Multikultural dan Relevansinya Bagi Penguatan Nasionalisme Bangsa Indonesia', kami akan membahas secara eksplisit maupun implisit dalam sub bagian, antara lain: (1) Pendidikan Multikultural dalam Konteks Keindonesiaan; (2) Tujuan Pendidikan

Multikultural bagi Kehidupan Kebangsaan Indonesia; (3) Tantangan Praksis Pendidikan Multikultural Bagi Kekinian Nasionalisme Masyarakat Indonesia

### **Pendidikan Multikultural dalam Konteks Keindonesiaan**

Pendidikan merupakan bagian dari kegiatan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Oleh sebab itu kegiatan pendidikan merupakan perwujudan dari cita-cita bangsa. Dengan demikian kegiatan pendidikan nasional perlu diorganisasikan dan dikelola sedemikian rupa supaya pendidikan nasional sebagai suatu organisasi dapat menjadi sarana untuk mewujudkan cita-cita nasional. Secara rinci cita-cita nasional yang terkait dengan kegiatan pendidikan telah dituangkan dalam Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Selanjutnya prinsip penyelenggaraan pendidikan secara jelas juga telah diuraikan dalam Undang-Undang Sisdiknas tersebut, yaitu tercantum pada pasal 4, bahwa : (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi

hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai cultural, dan kemajemukan bangsa; (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan system terbuka dan multimakna; (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat; (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran; (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat; (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Adapun fungsi pendidikan nasional sebagaimana tercantum pada Bab II pasal 3 disebutkan bahwa fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, fungsi pendidikan juga dapat dilihat dalam dua perspektif. *Pertama*, secara mikro (sempit), pendidikan berfungsi untuk membantu secara sadar perkembangan jasmani dan rohani peserta didik. *Kedua*, secara makro (luas), pendidikan berfungsi sebagai pengembangan pribadi, pengembangan

warga Negara, pengembangan kebudayaan dan pengembangan bangsa.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang masyarakatnya sangat majemuk atau pluralis. Kemajemukan sudah menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Kemajemukan ini dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu: perspektif horisontal dan dan vertikal. Dalam perspektif horisontal, kemajemukan bangsa kita dapat dilihat dari perbedaan agama, etnis, bahasa daerah, geografis, dan budayanya. Sedangkan dalam perspektif vertikal, kemajemukan bangsa Indonesia dapat dilihat dari perbedaan tingkat pendidikan, ekonomi, dan tingkat sosial budayanya.

Dari paparan tersebut mengindikasikan bahwa Pendidikan Multikultural menjadi sesuatu yang sangat penting dan mendesak untuk diimplementasikan dalam praksis pendidikan di Indonesia. Karena pendidikan multikultural dapat berfungsi sebagai sarana alternatif pemecahan konflik. Melalui pembelajaran yang berbasis multikultur, siswa diharapkan tidak tercerabut dari akar budayanya, dan rupanya diakui atau tidak pendidikan multikultural sangat relevan di praktekkan di alam demokrasi seperti saat ini.

Spektrum kultur masyarakat Indonesia yang amat beragam memang merupakan tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan untuk mengolah bagaimana ragam perbedaan tersebut justru dapat dijadikan asset, bukan



sumber perpecahan. Di era globalisasi ini pendidikan multikultural memiliki tugas ganda, yaitu selain menyatukan bangsa sendiri yang terdiri dari berbagai macam budaya tersebut, juga harus menyiapkan bangsa Indonesia untuk siap menghadapi arus budaya luar yang masuk ke negeri ini. Pendidikan multikultural juga dapat dimanfaatkan untuk membina siswa agar tidak tercerabut dari akar budayanya, sebab pertemuan antar budaya di era globalisasi ini bisa jadi dapat menjadi ancaman serius bagi anak didik kita. Dalam kaitan ini siswa perlu diberi penyadaran akan pengetahuan yang beragam, sehingga mereka memiliki kompetensi yang luas akan pengetahuan global, termasuk aspek kebudayaan (Yaqin, 2005:12).

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk membangun masyarakat yang mengakui dan menghargai perbedaan diperlukan proses pendidikan. Pendidikan Multikultural menjadi sangat strategis untuk dapat mengelola kemajemukan secara kreatif, dan hendaknya

merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai multikultur itu sendiri dalam institusi pendidikan.

Dalam konteks pendidikan Indonesia, konstruksi Pendidikan Multikultural perlu mempertimbangkan beberapa peran (Zamroni, 2011:67), antara lain: (1) Sebagai jantung untuk menciptakan kesetaraan pendidikan bagi seluruh warga masyarakat; (2) Bukan sekedar perubahan kurikulum atau perubahan metode pembelajaran; (3) Mentransformasi kesadaran yang memberikan arah kemana tujuan transformasi praktik pendidikan; (5) Membangun jembatan antara kurikulum dan karakter guru, pedagogi, iklim kelas, dan kultur sekolah guna membangun visi sekolah yang menjunjung kesetaraan.

Pendidikan multikultural adalah merupakan suatu gerakan pembaharuan dan proses untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang setara untuk seluruh siswa. Oleh karenanya praktek pendidikan multikultural di Indonesia dapat dilaksanakan secara fleksibel dengan mengutamakan prinsip-prinsip dasar multikultural. Apapun dan bagaimanapun bentuk dan model pendidikan multikultural, mestinya tidak dapat lepas dari tujuan umum pendidikan multikultural, yaitu : (1) Mengembangkan pemahaman yang mendasar tentang proses menciptakan sistem dan menyediakan pelayan pendidikan yang setara. (2) Menghubungkan kurikulum dengan karakter guru, pedagogi, iklim kelas,

budaya sekolah dan konteks lingkungan sekolah guna membangun suatu visi “lingkungan sekolah yang setara”

Menurut Tilaar (2004:181) bahwa pendidikan multikultural dalam konteks keindonesiaan adalah bagaimana membentuk peserta didik yang memiliki konsep, ide atau falsafah, kepercayaan dan pengakuan terhadap pentingnya keragaman budaya dan etnis di dalam membentuk dan membangun kehidupan bangsa dan bernegara, yang teraktualisasi dalam bentuk gaya hidup, pengalaman sosial, interaksi dan kerja sama serta saling menghargai satu dengan yang lainnya. Menurutnya, Pendidikan Multikultural bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik dengan sejumlah sikap dan keterampilan yang diperlukan dalam lingkungan budaya etnik mereka, budaya nasional dan antar budaya lainnya. Seorang peserta didik dari Irian Jaya misalnya, bukan hanya harus akrab dengan budaya kelompok etniknya sendiri, tetapi juga harus mampu membaur dan akrab dengan budaya etnik lain di luar kelompoknya.

Pendidikan Multikultural menjadi proses penanaman cara hidup menghormati, tulus dan toleran terhadap keragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural. Dengan demikian, pendidikan multikultural menjadi sangat strategis untuk dapat mengelola kemajemukan secara kreatif. Pendidikan Multikultural dapat membantu peserta didik untuk

mengerti, menerima dan menghargai orang dari suku, budaya, dan nilai yang berbeda.

Pendidikan Multikultural sangat penting untuk melatih dan membangun karakter siswa agar mampu bersikap demokratis, humanis, dan pluralis dalam lingkungan mereka (Koentjaraningrat, 2000:63). Dengan kata lain, melalui pendidikan multikultural peserta didik diharapkan dapat dengan mudah memahami, menguasai, memiliki kompetensi yang baik, bersikap dan menerapkan nilai-nilai demokratis, humanisme dan prularisme baik di sekolah maupun luar sekolah. Oleh karena itu, tujuan pokok dari pendidikan multikultural adalah untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan, demokrasi dan sekaligus humanisme.

### **Tujuan dan Manfaat Pendidikan Multikultural bagi Kekinian Kebangsaan Indonesia**

Pendidikan Multikultural di alam demokrasi Indonesia harus berorientasi pada kepentingan bangsa yang berlatar belakang multi etnik, multi agama, multi bahasa, dan sebagainya. Hal ini berarti bahwa penyelenggaraan pendidikan harus memperhatikan kondisi bangsa yang heterogen. Pendidikan multikultural menjadi upaya terdepan dalam membangun manusia Indonesia menjadi manusia yang sebenarnya, manusia yang mengakui adanya perbedaan, persamaan hak dan keadilan sosial. Semua manusia memperoleh hak yang sama untuk

menjadi manusia seutuhnya, karena itu semuanya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Menurut Zamroni (2011:87-93), dalam konteks pendidikan Indonesia, Pendidikan Multikultural memiliki tujuan dan manfaat eksplisit dan implisit, sebagai berikut:

### **Pengembangan Literasi Etnis dan Budaya**

Peserta didik dapat mempelajari tentang latar belakang sejarah, bahasa, karakteristik budaya, sumbangan, peristiwa kritis, individu yang berpengaruh, dan kondisi sosial, politik, dan ekonomi dari berbagai kelompok etnis mayoritas dan minoritas. Informasi ini yang komprehensif, analitis, dan komparatif, dan memahami persamaan dan perbedaan di antara kelompok-kelompok, akan membangun kemampuan literasi yang baik dalam diri peserta didik. Jelasnya, pengetahuan tentang pluralisme budaya merupakan dasar yang diperlukan untuk menghormati, mengapresiasi, menilai dan memperingati keragaman, baik lokal, nasional dan internasional.

### **Pengembangan Diri**

Peserta didik memiliki pemahaman diri yang lebih besar, konsep diri yang positif, dan kebanggaan pada identitas pribadinya, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap keseluruhan prestasi intelektual, akademis, dan sosial

siswa. Siswa merasa baik tentang dirinya sendiri karena lebih terbuka dan reseptif (menerima) dalam berinteraksi dengan orang lain dan menghormati budaya dan identitasnya. Peserta didik dapat memaksimalkan potensi kemanusiaan, dengan memenuhi kebutuhan individu, dan mengajar siswa seutuhnya dengan mempertinggi rasa penghargaan pribadi, kepercayaan dan kompetensi dirinya.

### **Klarifikasi Nilai dan Sikap**

Peserta didik dapat menghayati nilai-nilai inti yang berasal dari prinsip martabat manusia (*human dignity*), keadilan, persamaan, kebebasan, dan demokrasi. Peserta didik dapat menghargai dan menerima pluralisme etnis, menyadari bahwa perbedaan budaya tidak sama dengan kekurangan atau rendah diri, dan untuk mengakui bahwa keragaman merupakan bagian integral dari kondisi manusia. Pengklarifikasian sikap dan nilai etnis didesain untuk membantu peserta didik memahami bahwa berbagai konflik nilai dan berupaya mengelolanya dengan baik demi kemajuan sosial dan penguatan pluralisme etnis dan budaya, serta menjaga kesetiaan etnis (*ethnic allegiance*) dan loyalitas nasional (*national loyalty*). Menganalisa dan mengklarifikasi sikap dan nilai etnis merupakan langkah kunci dalam proses melepaskan potensi kreatif individu untuk memperbarui diri dan masyarakat untuk tumbuh-kembang lebih lanjut.

## Kompetensi Multikultural

Peserta didik dapat berinteraksi dengan dan memahami orang yang secara etnis, ras, dan kultural berbeda dari dirinya. Peserta didik dapat rampil dalam komunikasi lintas budaya, hubungan antar pribadi, pengambilan perspektif, analisis kontekstual, pemahaman sudut pandang dan kerangka berpikir alternatif, dan menganalisa bagaimana kondisi budaya mempengaruhi nilai, sikap, harapan, dan perilaku. Pendidikan Multikultural dapat membantu siswa mempelajari bagaimana memahami perbedaan budaya tanpa membuat pertimbangan nilai yang semena-mena tentang nilai intrinsiknya. Untuk mencapai tujuan ini anak dapat diberi pengalaman belajar dengan memberi berbagai kesempatan pada siswa untuk mempraktekkan kompetensi budaya dan berinteraksi dengan orang, pengalaman, dan situasi yang berbeda.

## Kemampuan Keterampilan Dasar

Memfasilitasi pembelajaran untuk melatih kemampuan ketrampilan dasar dari peserta didik yang berbeda secara etnis. Pendidikan Multikultural dapat memperbaiki penguasaan membaca, menulis dan ketrampilan matematika; materi pelajaran; dan ketrampilan proses intelektual seperti pemecahan masalah, berpikir kritis, dan pemecahan konflik dengan memberi materi dan teknik yang lebih bermakna untuk kehidupan dan kerangka berpikir dari siswa yang berbeda secara etnis.

Hal ini bisa terbangun apabila guru merespon kebutuhan ini dengan memasukkan simbol, gambar, dan informasi etnis dalam dekorasi ruang kelas, isi kurikulum dan interaksi interpersonal. Perasaan nyaman ini menciptakan latar belakang keterhubungan pribadi yang merupakan esensi rasa kepemilikan dalam belajar yang pada gilirannya lebih membimbing ke arah perhatian, upaya, dan waktu yang lebih terarah pada tugas, dan memperbaiki penguasaan tugas dan prestasi akademik.

## Kesadaran dan Keadilan Sosial

Peserta didik dapat mengembangkan rasa kesadaran sosial (*a sense of social consciousness and justice*), keberanian moral, dan komitmen terhadap persamaan; dan terampil dalam memecahkan masalah-masalah sosial.

## Menjadi Agen Perubahan Sosial

Peserta didik memiliki sikap, nilai, kebiasaan dan ketrampilan dan memiliki komitmen yang tinggi untuk menjadi agen perubahan sosial (*social change agents*) demi memberantas perbedaan (*disparities*) etnis dan rasial. Peserta didik dapat mengembangkan kemampuan pengambilan keputusan, ketrampilan tindakan sosial, kemampuan kepemimpinan, dan komitmen moral atas harkat dan persamaan. Mereka tidak hanya perlu memahami dan mengapresiasi mengapa

pluralisme etnis dan budaya itu ada, namun juga bagaimana menterjemahkan pengetahuan kepada keputusan dan tindakan yang berhubungan dengan isu, peristiwa dan situasi sosiopolitis yang esensial. Peserta didik dapat menjadi kritikus sosial (*social critics*), aktivis politik (*political activists*), agen perubahan (*change agents*), dan pemimpin yang berkompeten dalam masyarakat dan yang berbeda secara etnis dan pluralistik secara kultural. Pendidikan Multikultural juga membantu siswa mempelajari ketrampilan yang dibutuhkan untuk berpartisipasi di dalam tindakan kewarganegaraan (*a civic action*), yang merupakan bagian integral dari negara yang berlandaskan Pancasila.

### **Memiliki Wawasan Kebangsaan/ Kenegaraan yang kokoh.**

Dengan mengetahui kekayaan budaya bangsa itu akan tumbuh rasa kebangsaan yang kuat. Rasa kebangsaan itu akan tumbuh dan berkembang dalam wadah negara Indonesia yang kokoh. Untuk itu Pendidikan Multikultural perlu menambahkan materi, program dan pembelajaran yang memperkuat rasa kebangsaan dan kenegaraan dengan menghilangkan etnosentrisme, prasangka, diskriminasi dan stereotipe.

### **Memiliki Wawasan Hidup yang Luas**

Peserta didik dapat memiliki wawasan sebagai warga dunia (*world citizen*). Namun siswa harus tetap dikenalkan dengan budaya lokal, harus diajak

berpikir tentang apa yang ada di sekitar lokalnya. Peserta didik diarahkan untuk berpikir secara internasional dan tetap peduli dengan situasi yang ada di sekitarnya (*think globally, act locally*).

### **Hidup Damai**

Berangkat dari kesadaran bahwa perbedaan adalah sebuah keniscayaan, peserta didik senantiasa menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, menghargai persamaan, semakin bertumbuhnya sikap toleran terhadap kelompok lain dan pada gilirannya dapat hidup berdampingan secara damai.

### **Tantangan Praksis Pendidikan Multikultural Bagi Nasionalisme Masyarakat Indonesia**

Menurut Anita Lie (Tilaar, 2002:54), Pendidikan Multikultural dalam era globalisasi di Indonesia menghadapi tiga tantangan mendasar secara internal dalam bidang pendidikan, yaitu: *Pertama*, fenomena hegemonisasi yang terjadi di dunia pendidikan akibat tarik ulur antara keunggulan dan keterjangkauan. Peserta didik tersegregasi dalam sekolah-sekolah sesuai latar belakang sosial ekonomi, agama dan etnisitas. *Kedua*, Kurikulum yang masih berdasarkan gender, status ekonomi sosial, kultur lokal dan geografis. Hal ini menunjukkan ketidakseimbangan dan bias yang membatasi kesadaran multikultural peserta didik. *Ketiga*, guru. Kelayakan dan kompetensi guru di Indonesia pada umumnya masih di

bawah standar apalagi untuk mengelola pembelajaran multikulturalisme. *Keempat*, politik pendidikan yang belum sepenuh hati mendukung konsep dan praksis pendidikan multicultural, baik dari tingkat pusat sampai pada tingkat lokal.

Empat tantangan di atas berkaitan masalah kebijakan internal praktis pendidikan. Namun, masih adalah beberapa realitas mendasar kebangsaan yang menjadi tantangan eksternal dalam penerapan konsep dan praksis Pendidikan Multikultural (Zamroni, 2011:96-99; bdk. Mahfud, 2008:-89-90). Realitas-realitas mendasar tersebut, antara lain:

### **Keragaman Identitas Budaya Daerah**

Keragaman ini menjadi modal sekaligus potensi konflik. Keragaman budaya daerah memang memperkaya khasanah budaya dan menjadi modal yang berharga untuk membangun Indonesia yang multikultural. Namun kondisi aneka budaya itu sangat berpotensi memecah belah dan menjadi lahan subur bagi konflik dan kecemburuan sosial. Masalah itu muncul jika tidak ada komunikasi antar budaya daerah. Tidak adanya komunikasi dan pemahaman pada berbagai kelompok budaya lain ini justru dapat menjadi konflik. Sebab dari konflik-konflik yang terjadi selama ini di Indonesia dilatarbelakangi oleh adanya keragaman identitas etnis, agama dan ras, seperti peristiwa Sampit, poso, dll.

Dalam mengantisipasi hal itu, keragaman yang ada harus diakui sebagai sesuatu yang mesti ada dan dibiarkan tumbuh sewajarnya. Selanjutnya, diperlukan suatu manajemen konflik agar potensi konflik dapat terkoreksi secara dini untuk ditempuh langkah-langkah pemecahannya, termasuk di dalamnya melalui Pendidikan Multikultural. Dengan adanya Pendidikan Multikultural itu diharapkan masing-masing warga daerah tertentu bisa mengenal, memahami, menghayati dan bisa saling berkomunikasi.

### **Pergeseran Kekuasaan dari Pusat ke Daerah**

Sejak dilanda arus reformasi dan demokratisasi, Indonesia dihadapkan pada beragam tantangan baru yang sangat kompleks. Satu di antaranya yang paling menonjol adalah persoalan budaya. Dalam arena budaya, terjadinya pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah membawa dampak besar terhadap pengakuan budaya lokal dan keragamannya. Bila pada masa Orba, kebijakan yang terkait dengan kebudayaan masih tersentralisasi, maka kini tidak lagi. Kebudayaan, sebagai sebuah kekayaan bangsa, tidak dapat lagi diatur oleh kebijakan pusat, melainkan dikembangkan dalam konteks budaya lokal masing-masing. Ketika sesuatu bersentuhan dengan kekuasaan maka berbagai hal dapat dimanfaatkan untuk merebut kekuasaan ataupun melanggengkan kekuasaan itu, termasuk di dalamnya isu kedaerahan.

Konsep “putra daerah” untuk menduduki pos-pos penting dalam pemerintahan sekalipun memang merupakan tuntutan yang demi pemerataan kemampuan namun tidak perlu diungkapkan menjadi sebuah ideologi. Tampilnya putra daerah dalam pos-pos penting memang diperlukan agar putra-putra daerah itu ikut memikirkan dan berpartisipasi aktif dalam membangun daerahnya. Harapannya tentu adalah adanya asas kesetaraan dan persamaan. Namun bila isu ini terus menerus dihembuskan justru akan membuat orang terkotak oleh isu kedaerahan yang sempit. Orang akan mudah tersulut oleh isu kedaerahan. Faktor pribadi (misalnya iri, keinginan memperoleh jabatan) dapat berubah menjadi isu publik yang destruktif ketika persoalan itu muncul di antara orang yang termasuk dalam putra daerah dan pendatang.

Konsep pembagian wilayah menjadi propinsi atau kabupaten baru yang marak terjadi akhir-akhir ini sengaja dihembuskan oleh kalangan tertentu agar mendapatkan simpati dari warga masyarakat. Mereka menggalang kekuatan dengan memanfaatkan isu kedaerahan ini. Warga menjadi mudah tersulut karena mereka berasal dari kelompok tertentu yang tertindas dan kurang beruntung.

### **Kurang Kokohnya Nasionalisme**

Keragaman budaya ini membutuhkan adanya kekuatan yang menyatukan (*integrating force*) seluruh pluralitas negeri ini. Pancasila sebagai

pandangan hidup bangsa, kepribadian nasional dan ideologi negara merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar lagi dan berfungsi sebagai kekuatan penyatu (*integrating force*). Saat ini Pancasila kurang mendapat perhatian dan kedudukan yang semestinya sejak isu kedaerahan semakin semarak. Persepsi sederhana dan keliru banyak dilakukan orang dengan menyamakan antara Pancasila itu dengan ideologi Orde Baru yang harus ditinggalkan. Pada masa Orde Baru kebijakan dirasakan terlalu tersentralisasi. Sehingga ketika Orde Baru tumbang, maka segala hal yang menjadi dasar dari Orde Baru dianggap jelek, perlu ditinggalkan dan diperbarui, termasuk di dalamnya Pancasila. Tidak semua hal yang ada pada Orde Baru jelek, sebagaimana halnya tidak semuanya baik. Ada hal-hal yang tetap perlu dikembangkan. Nasionalisme perlu ditegakkan namun dengan cara-cara yang edukatif, persuasif dan manusiawi bukan dengan pengerahan kekuatan. Sejarah telah menunjukkan peranan Pancasila yang kokoh untuk menyatukan kedaerahan ini. Kita sangat membutuhkan semangat nasionalisme yang kokoh untuk meredam dan menghilangkan isu yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa ini.

### **Fanatisme Sempit**

Fanatisme dalam arti luas memang diperlukan. Namun yang salah adalah fanatisme sempit, yang menganggap bahwa kelompoknyalah yang paling benar, paling baik dan kelompok lain

harus dimusuhi. Gejala fanatisme sempit yang banyak menimbulkan korban ini banyak terjadi di tanah air ini. Gejala Bonek (bondonekat) di kalangan suporter sepak bola nampak menggejala di tanah air. Kecintaan pada klub sepak bola daerah memang baik, tetapi kecintaan yang berlebihan terhadap kelompoknya dan memusuhi kelompok lain secara membabi buta maka hal ini justru tidak sehat. Terjadi pelemparan terhadap pemain lawan dan pengrusakan mobil dan benda-benda yang ada di sekitar stadion ketika tim kesayangannya kalah menunjukkan gejala ini.

Kecintaan dan kebanggaan pada korps memang baik dan sangat diperlukan. Namun kecintaan dan kebanggaan itu bila ditunjukkan dengan bersikap memusuhi kelompok lain dan berperilaku menyerang kelompok lain maka fanatisme sempit ini menjadi hal yang destruktif. Terjadinya perseteruan dan perkelahian antara oknum aparat kepolisian dengan oknum aparat tentara nasional Indonesia yang kerap terjadi di tanah air ini juga merupakan contoh dari fanatisme sempit ini. Apalagi bila fanatisme ini berbau dengan isu agama (misalnya di Ambon, Maluku dan Poso, Sulawesi Tengah), maka akan dapat menimbulkan gejala ke arah disintegrasi bangsa.

### **Konflik Kesatuan Nasional dan Multikultural**

Ada tarik menarik antara kepentingan kesatuan nasional dengan gerakan multikultural. Di satu sisi ingin

mempertahankan kesatuan bangsa dengan berorientasi pada stabilitas nasional. Namun dalam penerapannya, kita pernah mengalami konsep stabilitas nasional ini dimanipulasi untuk mencapai kepentingan-kepentingan politik tertentu. Adanya Gerakan Aceh Merdeka di Aceh dapat menjadi contoh ketika kebijakan penjagaan stabilitas nasional ini berubah menjadi tekanan dan pengerah kekuatan bersenjata. Hal ini justru menimbulkan perasaan anti pati terhadap kekuasaan pusat yang tentunya hal ini bisa menjadi ancaman bagi integrasi bangsa. Untunglah perbedaan pendapat ini dapat diselesaikan dengan damai dan beradab. Kini, semua pihak yang bertikai sudah bisa didamaikan dan diajak bersama-sama membangun daerah yang porak poranda akibat peperangan yang berkepanjangan dan terjangan Tsunami ini.

Di sisi multikultural, kita melihat adanya upaya yang ingin memisahkan diri dari kekuasaan pusat dengan dasar pembenaran budaya yang berbeda dengan pemerintah pusat yang ada di Jawa ini. Contohnya adalah gerakan OPM (Organisasi Papua Merdeka) di Papua. Namun ada gejala ke arah penyelesaian damai dan multikultural yang terjadi akhir-akhir ini. Salah seorang panglima perang OPM yang menyerahkan diri dan berkomitmen terhadap NKRI telah mendirikan *Kampung Bhineka Tunggal Ika* di Nabire, Irian Jaya.



### **Tidak adil dan Tidak Meratanya Kebijakan Ekonomi**

Kejadian yang nampak bernuansa SARA seperti Sampit beberapa waktu yang lalu setelah diselidiki ternyata berangkat dari kecemburuan sosial yang melihat warga pendatang memiliki kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik dari warga asli. Jadi beberapa peristiwa di tanah air yang bernuansa konflik budaya ternyata dipicu oleh persoalan kesejahteraan ekonomi. Keterlibatan orang dalam demonstrasi yang marak terjadi di tanah air ini, apapun kejadian dan tema demonstrasi, seringkali terjadi karena orang mengalami tekanan hebat di bidang ekonomi. Bahkan ada yang demi selembar kertas duapuluh ribu orang akan ikut terlibat dalam demonstrasi yang dia sendiri tidak mengetahui maksudnya. Sudah banyak kejadian yang terungkap di media massa mengenai hal ini. Orang akan dengan mudah terintimidasi untuk melakukan tindakan yang anarkis ketika himpitan ekonomi yang mendera mereka. Mereka akan menumpah kekesalan mereka pada kelompok-kelompok mapan dan dianggap menikmati kekayaan yang dia tidak mampu meraihnya.

### **Peran Media Massa yang Belum Cerdas**

Di antara media massa tentu ada ideologi yang sangat dijunjung tinggi dan dihormati. Persoalan kebebasan pers, otonomi, hak publik untuk mengetahui hendaknya diimbangi dengan tanggung jawab terhadap dampak pem-

beritaan. Mereka juga perlu mewaspada adanya pihak-pihak tertentu yang pandai memanfaatkan media itu untuk kepentingan tertentu, yang justru dapat merusak budaya Indonesia. Kasus perselingkuhan artis dengan oknum pejabat pemerintah yang banyak dilansir media massa dan tidak mendapat "hukuman yang setimpal" baik dari segi hukum maupun sanksi kemasyarakatan dapat menumbuhkan budaya baru yang merusak kebudayaan yang luhur. Memang berita semacam itu sangat layak jual dan selalu mendapat perhatian publik, tetapi kalau terus-menerus diberitakan setiap hari mulai pagi hingga malam hari maka hal ini akan dapat mempengaruhi orang untuk menyerap nilai-nilai negatif yang bertentangan dengan budaya ketimuran. Kasus perceraian rumah tangga para artis yang tiap hari diudarakan dapat membentuk opini publik yang negatif. Sehingga kesan kawin cerai di antara artis itu sebagai budaya baru dan menjadi trend yang biasa dilakukan. Orang menjadi kurang menghormati lembaga perkawinan. Sebaiknya isu kekayaan tidak menjadi isu yang selalu menjadi tema sinetron karena dapat mendidik orang untuk terlalu mengagungkan materi dan menghalalkan segala cara. Begitu juga tampilan yang seronok mengundang birahi, pengudaraan modus kejahatan baru atau pun iklan yang bertubi-tubi dapat

menginspirasi orang melakukan sesuatu yang tidak pantas dilakukan. Televisi dan media massa harus membantu memberi bahan tontonan dan bacaan yang mendidikkan budaya yang baik. Karena menonton televisi dan membaca koran sudah menjadi tradisi yang kuat di negeri ini. Sehingga tontonan menjadi tuntunan, bukan tuntunan sekedar menjadi tontonan.

## PENUTUP

Perubahan dan perkembangan yang begitu cepat, tiba-tiba dan mengejutkan dalam arus globalisasi menuntut masyarakat dunia pada umumnya, dan masyarakat Indonesia khususnya, untuk memiliki karakter budaya yang kuat. Bila masyarakat tidak memiliki karakter budaya yang kuat, maka akan menyebabkan tergerus dan terdegradasinya kehidupannya masyarakat dalam segala bidang kehidupannya. Salah satu yang bisa diandalkan untuk bisa memberi penguatan terhadap karakter budaya adalah dengan mengeksplorasi kembali nilai-nilai budaya melalui paradigm pendidikan. Untuk itu, Pendidikan Multikultural di Indonesia perlu direspon untuk menjaga keutuhan bangsa yang kaya akan multi kultur.

Pendidikan Multikultural merupakan manifestasi kesadaran tentang keanekaragaman kultural, HAM serta

upaya meminimalisasi dan mereduksi kecenderungan berprasangka dalam menjalankan kehidupan bersama. Pendidikan Multikultural juga dapat dijadikan instrumen strategis untuk mengembangkan kesadaran atas kebanggaan seseorang terhadap bangsanya. Dalam menghadapi pluralisme budaya, diperlukan paradigma pendidikan multicultural yang lebih toleran dan elegan untuk mencegah dan memecahkan masalah benturan-benturan budaya tersebut. Dengan demikian, Pendidikan Multikultural sangat relevan dan urgen sesuai dengan situasi dan kondisi multi etnis, multi ras, dan multikultur yang riil dan factual dalam konteks kebangsaan Indonesia dewasa ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi. 2007. "Identitas dan Krisis Budaya, Membangun Multikulturalisme Indonesia", <http://www.kongresbud.budpar.go.id/58%20azyumardi%20azra.html>.
- Banks, J.A. 1993. *Multicultural Education: Issues and Perspectives*. Needham Heights, Massachusetts : Allyn and Bacon. <https://faculty.washington.edu/jbanks/>, diakses, 21 Februari 2016.
- \_\_\_\_\_.2002. *An introduction to Multicultural Education*, Boston-London: Allyn and Bacon Press. <https://faculty.washington.edu/jbanks/>, diakses, 21 Februari 2016.
- \_\_\_\_\_.2007. *Educating citizens in multicultural society. Second edition*. New York: Teachers College Columbia University. . <https://faculty.washington.edu/jbanks/>, diakses, 21 Februari 2016.

- Danzak, Robin L. 2015. "Sometimes the Perspective Changes": Reflections on a Photography Workshop with Multicultural Students in Italy, by International Journal of Multicultural Education, <http://ijme-journal.org/index.php/ijme>, Diakses, 26 Februari 2016.
- Delors. 1996. *Learning: The Treasure Within*, New York: Random House.
- Djohar. 2003. *Pendidikan Strategik, Alternatif untuk Pendidikan Masa Depan*, Yogyakarta : LESFI.
- Fukuyama, Francis & Samuel P. Huntington, *The Future of The World Order (Masa Depan Peradaban dalam Cengkeraman Demokrasi Liberal versus Pluralisme)*, Yogyakarta:IRCSod, 2005.
- Gorski. 2001. <http://www.aaanet.org/cae/aeq/br/gorski.htm>
- Hernandez, Hilda. 1989. *Multicultural Education: A teacher Guide to linking Context, Process, and Content*, New Jersey & Ohio : Prentice Hall.
- Jones, Joseph R. 2015. *Infusing Multicultural Education into the Curriculum: Preparing Pre-Service Teachers to Address Homophobia in K-12 Schools*, <http://ijme-journal.org/index.php/ijme>, by International Journal of Multicultural Education, Diakses, 26 Februari 2016.
- Koentaraningrat. 2000. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kompas, 24 Agustus 2015.
- Lubis, Akhyar Yusuf, 2006. *Deskontruksi Epistemologi Modern*. Jakarta: Pustaka Indonesia Satu.
- Outhwaite, William. 2008. *Ensiklopedi Pemikiran Sosial Moderen*. Jakarta; Kencana.
- Mahfud, Choirul. 2008. *Pendidikan Multikultural*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Modica, Marianne. 2015. "[My Skin Color Stops Me from Leading](http://ijme-journal.org/index.php/ijme)": Tracking, Identity, and Student Dynamics in a Racially Mixed School, <http://ijme-journal.org/index.php/ijme>, by International Journal of Multicultural Education, Diakses, 26 Februari 2016.
- Rochiati W. 2015. *Filsafat Ilmu; Relevansinya Dengan Pendidikan IPS*, Bandung:Rizqi Press.
- Sleeter, C., & Grant, C. 1993. *Making Choices for Multicultural Ceducation: Five Approaches to Race, Class, and Gender* (2nd ed.). <http://ijme-journal.org/index.php/ijme>, by International Journal of Multicultural Education, Diakses, 24 Februari 2016.
- Tilaar, H.A.R. 2002. *Pendidikan, Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Multikulturalisme : Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Yaqin, M. Ainul 2005. *Pendidikan Multikultural: Cross-cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*. Yogyakarta: Pilar Media.

- Wahab, Rochmat 2014. *Multicultural Education: Its Implication For General Education And Gifted Education In Indonesia*, <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/EDUCATION/INDONESIA.pdf>, Diakses, 26 Februari 2016.
- Zamroni. (2010a). *The Implementation of Multicultural Education. A Reader*. Yogyakarta: Graduate Program The State University of Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2011. *Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultural*. Yogyakarta: Gavin Kalam Utama.
- Zarate, Eneviève Danielle Levy; Claire Kramersch. 2011. *Handbook of Multilingualism and Multiculturalism*. Archives contemporaines, <http://ijme-journal.org/index.php/ijme>, by International Journal of Multicultural Education, Diakses, 24 Februari 2016.